

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN SAMPAH DALAM MEWUJUDKAN KOTA SEMARANG BERSIH

(Studi Kasus : Pengelolaan Sampah di TPA Jatibarang)

Tia Arfani S.R, Hesti Lestari

Jurusan Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Profesor Haji Soedarto S.H, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465402 Faksimile (024) 7465404

Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email : fisip@undip.ac.id

Abstrack

Semarang City is a densely populated city with a fairly high mobility. The large number of residents, both natives and immigrants, causes many changes, one of which is the production of waste. Effective waste management is absolutely necessary so that the waste produced can be managed properly. With effective management, it is hoped that Semarang will become a clean city. This problem received a response from the government through the Environmental Service so that it was followed up. One of them is waste management at the Jatibarang TPA. This study uses the theory of effectiveness from several experts and uses the reference to the effectiveness criteria proposed by Gibson. This study uses a qualitative descriptive method conducted through interviews and also documentation. The results of the study indicate that the waste processing at the Jatibarang TPA is quite effective. Adjustment of needs with waste management innovations that are continuously improved so that problems can be resolved. The main obstacle felt was regarding funding for several facilities and infrastructure, the overwhelming need with the funds provided was felt to have not been fulfilled. The advice given is to increase public awareness to reduce waste generation so that waste can be controlled and the burden of the landfill will be reduced.

Key words: Effectiveness, waste management, Clean City.

Abstrak

Kota Semarang merupakan kota padat penduduk dengan mobilitas yang cukup tinggi. Banyaknya penduduk baik penduduk asli maupun pendatang menyebabkan banyak perubahan, salah satunya adalah produksi sampah. Pengelolaan sampah yang efektif tentunya sangat diperlukan agar sampah-sampah yang dihasilkan dapat dikelola dengan baik. Dengan pengelolaan yang efektif diharapkan dapat menjadikan Semarang sebagai kota yang bersih. Permasalahan tersebut mendapat respon dari pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup agar ditindak lanjuti. Salah satunya adalah pengelolaan sampah di TPA Jatibarang. Penelitian ini menggunakan teori efektivitas dari beberapa pakar dan menggunakan acuan kriteria efektivitas yang di kemukakan oleh Gibson. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang dilakukan melalui wawancara dan juga dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pengolahan sampah di TPA Jatibarang sudah cukup efektif. Penyesuaian kebutuhan dengan inovasi pengelolaan sampah yang terus ditingkatkan sehingga permasalahan bisa teratasi. Kendala utama yang dirasakan adalah mengenai pendanaan untuk beberapa sarana dan prasarana, kebutuhan yang membeludak dengan dana yang diberikan dirasakan belum memenuhi. Saran yang diberikan adalah peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengurangi timbulan sampah sehingga sampah dapat terkontrol dan beban TPA akan berkurang.

Kata kunci : Efektivitas, pengelolaan sampah, Kota Bersih.

A. Pendahuluan

Sampah menurut UU No. 18 Tahun 2008 memiliki arti sebagai bahan yang tersisa dari kegiatan sehari-hari manusia dan juga hasil alamiah berbentuk padat. Kota Semarang bisa dikatakan menjadi bagian kota besar di Indonesia dengan kepadatan penduduk tinggi, menghasilkan sampah yang cukup tinggi pula. Pertambahan penduduk yang signifikan yang dialami oleh suatu wilayah dapat memberikan pengaruh yang cukup kompleks. Meningkatnya volume sampah yang dihasilkan menjadi salah satu pengaruh buruknya. Meningkatnya volume sampah jika

tidak ada keserasian dengan sistem pengelolaan yang baik maka akan menimbulkan persoalan yang lainnya. Pengelolaan sampah dapat dimaknai dengan penyusunan aturan mengenai mengendalikan timbulan sampah, penimbunan, proses pemindahan, pengangkutan dan pengelolaan sampah. Berlakunya undang-undang mengenai pengolahan sampah dapat ditelaah bahwa di dalamnya terdapat substansi penting. Substansi penting tersebut dapat disimpulkan mengenai peran pemerintah daerah yang diwajibkan mengubah sitematika dari sampah yang dibuang menjadi sampah yang terolah.

Tabel 1.1. Produksi Sampah Kota Semarang

Tahun	Produksi Sampah (Ton)
2015	1249
2016	1270
2017	1200
2018	1400
2019	1200

Produksi sampah Kota Semarang setiap harinya kurang lebih adalah 1200 ton, dengan jumlah sampah dalam satu tahunnya mencapai 430.000 ton. Pengelolaan sampah dengan konsep 3R sudah diterapkan oleh pemerintah. Upaya Pemerintah Kota Semarang tersebut kenyataannya belum sanggup memerangi permasalahan sampah. Sedangkan pada kenyataannya timbulan sampah yang dihasilkan kian bertambah untuk setiap harinya. Secara teknis Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang mengatasi persoalan sampah dengan melakukan pengambilan, penampungan di Tempat Pembuangan Sementara (TPS), dan membawanya ke TPA. Alur pengerjaan yang demikian, akan mengakibatkan kendala salah satunya tidak tercukupinya tempat penampungan dan berbagai persoalan lainnya yang dapat di alami. Upaya dalam mencegah TPA Jatibarang mengalami kelebihan muatan tersebut, Pemerintah Kota Semarang melalui DLH menggunakan sistem pengelolaan sampah terpadu melalui Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yang berada di wilayah kecamatan. Mengurangi volume timbulan sampah, mengendalikn penggunaan lahan yang semakin terbatas, menghemat biaya,

meningkatkan kesadaran dan kemandirian masyarakat dengan berperan aktif memperetahankan kebersihan lingkungan merupakan tujuan dari pengelolaan sampah terpadu.

UU No. 18 Tahun 2008 menekankan bahwa semua pihak wajib memprioritaskan pengurangan sampah dengan melakukan pelaksanaan 3R yaitu *reuse* (menggunakan kembali), *recycle* (mendaur ulang) dan *reduce* (mengurangi). Seirama dengan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2012 yang menyebutkan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga harus dilakukan oleh setiap individu dengan kewajiban menurunkan dan melakukan pengurangan sampah dengan memperhatikan kebaikan lingkungan. Pemerintah membuat rancangan-rancangan yang diupayakan sebagai penanggulangan permasalahan persampahan. Hal tersebut tentunya harus diiringi dengan partisipasi masyarakat dalam menangani permasalahan sampah ini, sehingga hasilnya akan lebih makasimal.

B. Kajian Teori

1. Administrasi Publik

Trecker (dalam Keban, 2008 : 2) memberikan pendapatnya bahwa administrasi adalah proses yang dilaksanakan secara terus menerus berubah dan juga berkelanjutan, yang dlaksanakan untuk mencapai tujuan dengan pemanfaatan sumberdaya manusia dan juga alat-alat didalamnya dengan korrdinasi dan kerjasama. Administrasi publik menurut Chandler

dan Plano (dalam Keban, 2008 : 3) adalah proses-proses dimana pegawai publik dan sumberdaya diorganisasi dan dikoordinasi untuk merumuskan, melaksanakannya, dan mengorganisasikan ketentuan-ketentuan dalam kebijakan publik. Administrasi publik memiliki tujuan untuk dapat memecahkan masalah-masalah yang dialami oleh publik yang harus diperbaiki dan di sempurnakan terutama dalam suatu oeganisasi, suberdaya manusia dan keuangan. Jhon M. Pfiffner dan Robert V. Presthus (dalam Syafiie, 2010 : 23) menyapaikan pendefinisianya terhadap administrasi publik yaitu :

- 1) Administrasi publik meliputi pelaksanaan dari kebijakan pemerintah yang telah diputuskan oleh lembaga perwakilan.
- 2) Administrasi publik dapat didefinisikan penyelarasan usaha tiap orang dan juga kelompok untuk menjalankan kebijaksanaan pemerintah. Hal ini meliputi pekerjaan sehari-hari pemerintahan.
- 3) Secara umum administrasi publik merupakan proses yang berkaitan dengan kegiatan implementasi kebijakan pemerintah, pengendali kebijakan, dan cara-cara yang tidak terkira jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang.

2. Manajemen

Menurut Stoner (dalam Handoko, 2015 : 8) manajemen dikatakan sebagai suatu proses yang didalamnya terdapat unsur-unsur penting yaitu perencanaan,

pengorganisasian, pengarahan dan juga pengawasan serta usaha dari para anggota dengan pemanfaatan sumberdaya yang ada dalam pencapaian tujuan. Manajemen dapat dimaknakan sebagai pekerjaan yang dilaksanakan bersama dengan orang lain untuk menetapkan, menafsirkan dan meraih tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan melaksanakan fungsi manajemen. Terdapat empat fungsi utama dalam manajemen yaitu:

1) Perencanaan (*Planning*)

Proses dalam merangkai berbagai kebutuhan dalam suatu organisasi seperti merumuskan tujuan yang hendak dicapai, merangkai cara dalam melaksanakan tujuan, dan pengembangan rencana dari tindakan yang hendak dilaksanakan. Proses ini merupakan proses yang dapat dikatakan merupakan proses terpenting, hal tersebut dikarenakan perencanaan merupakan proses paling awal dalam suatu rangkaian proses manajemen. Beberapa kegiatan yang dilakukan pada proses ini antara lain menetapkan target dan tujuan yang hendak dicapai, membuat rencana-rencana dalam pencapaian yang diharapkan, menentukan sumberdaya yang nantinya diperlukan, dan menetapkan indikator atau standar keberhasilan. Strategi diperlukan untuk mempermudah dalam melaksanakan apa yang telah dirumuskan sebelumnya.

2) Pengorganisasian (*Organizing*)

Pada tahapan ini pembagian pekerjaan terlihat dengan jelas dengan adanya struktur yang formal. Strategi yang

telah dirumuskan sebelumnya diatur sedemikian rupa dalam struktur organisasi yang tepat, lingkungan organisasi yang memadai, dan memastikan semua yang terlibat dalam organisasi bekerja dengan sungguh-sungguh.

3) Pengarahan (*Actuating/Directing*)

Secara sederhana fungsi ini menggerakkan para karyawan atau anggota dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan apa yang diinginkan dan harus dijalankan tanpa pengecualian. Kepemimpinan diterapkan pada fungsi ini dimana gaya, kualitas dan juga kekuasaan merupakan hal yang dasar. Penerapan dari proses kepemimpinan dan juga pendampingan terus dilakukan agar semua sesuai dengan yang diharapkan dan mencapai kinerja yang baik.

4) Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan dilakukan untuk mengetahui apakah tujuan dapat tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan dan ditargetkan sebelumnya, sehingga kegiatan yang tidak semestinya terjadi tidak terulang kembali. Dengan pengawasan fungsi-fungsi sebelumnya dapat terlihat apakah sudah sesuai dengan keadaan atau belum, untuk selanjutnya dapat dijadikan perbaikan-perbaikan.

3. Manajemen Perkotaan

Menurut Prof. Bintoro (dalam Fawahid, 2016 :5) melihat kota dari segi geografisnya, kota merupakan jaringan kehidupan dengan tanda kepadatan penduduk yang cukup tinggi dan

memiliki strata ekonomi heterogen cenderung bercorak materialistis. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang kawasan perkotaan adalah suatu tempat dengan kegiatan yang beragam serta kegiatan pertanian bukanlah yang utama dengan susunan pemfungsian kawasan sebagai tempat bermukim, pemusatan dan pendistribusian pelayanan pemerintahan, pelayanan sosial dan juga kegiatan ekonomi lainnya. Manajemen perkotaan (*Urban Management*) dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan sebagai rangkaian melaksanakan perencanaan suatu kota dalam pencapaian sasaran pembangunan. Tercapainya suatu tujuan melalui tepatnya tahapan yang dilakukan dan pelaksanaannya secara maksimal dan terpadu.

4. Efektivitas

Balduck dan Buelens (dalam Kadek, 2018 : 27) menyebutkan salah satu ukuran keberhasilan organisasi dalam pencapaian tujuan adalah efektivitas. Menurut Robbins (dalam Darwis dkk, 2017 : 14) tingkat pencapaian dalam jangka waktu singkat ataupun panjang merupakan perwujudan efektivitas. Efektif atau tidaknya suatu tujuan dapat dilihat dengan berbagai kriteria atau pengukuran, Gibson (dalam Annas, 2017 : 76) menyebutkan beberapa kriteria tersebut yaitu:

a. Jelasnya tujuan yang ingin dicapai

- b. Strategi dalam pencapaian tujuan harus jelas
- c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap
- d. Perencanaan yang matang
- e. Menyusun program yang tepat
- f. Sarana dan prasarana yang memadai
- g. Efisiensi dalam pelaksanaan
- h. Adanya pengawasan dan pengendalian

C. Metodologi

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Denzin dan Lincoln (dalam Anggito, Setiawan, 2018 :7) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang mempergunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Situs penelitian yang dijadikan objek peneliti adalah TPA Jatibarang. Peneliti mendapatkan data berupa data primer dari wawancara dan juga data sekunder dari dokumen-dokumen yang ditemukan. Peneliti menggunakan penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk mendapatkan deskripsi atau penjelasan dari suatu fenomena penelitian.

D. Hasil penelitian dan Pembahasan

1. Perencanaan

Pemerintah Kota Semarang menetapkan beberapa misi dalam pembangunan. Salah satunya adalah mewujudkan kota metropolitan yang dinamis dan berwawasan lingkungan. Sasaran dan tujuan yang ingin dicapai Dinas Lingkungan Hidup adalah terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas. Kebijakan yang menjadi fokus adalah peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan serta penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah. Menindaklanjuti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, pemerintah daerah menerbitkan Perda No 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah. Disebutkan tujuan dari pengelolaan sampah adalah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Peraturan yang selanjutnya diterbitkan adalah Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Penggunaan Plastik. Peraturan tersebut diterbitkan dalam rangka upaya pengurangan sampah plastik di Kota Semarang.

2. Pengorganisasian

UPTD TPA yang merupakan salah satu bagian dari Dinas Lingkungan Hidup memiliki struktur organisasinya sendiri. Hal dikarenakan UPTD merupakan substansi yang di dalamnya melaksanakan tugasnya memerlukan struktur tersendiri. Staf di TPA Jatibarang sendiri berjumlah 30 orang, dengan komposisi 10 orang ASN dan 20 orang pekerja non ASN atau pekerja

kontrak. Pendelegasian tugas dan wewenang sudah jelas sehingga mempermudah pekerjaan setiap bagian-bagian pekerjaan.

3. Pelaksanaan Program Pengolahan Sampah

Permasalahan pengelolaan sampah khususnya sampah plastik di perlukan adanya upaya pengendalian sehingga produksi sampah plastik dapat di minimalisir. Wali Kota Semarang menerbitkan peraturan Wali Kota Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik, peraturan tersebut dibentuk dalam upaya peningkatan kesadaran para pengiat usaha dan juga masyarakat secara umum lebih peduli terhadap lingkungannya. Timbulan sampah tentunya harus di tempatkan dalam wadah untuk menghindari pencemaran lingkungan dan tentunya demi kesehatan lingkungan. Setiap sumber sampah harus memiliki tempat atau wadah sementara sebelum akhirnya dibawa ke TPS. Pengumpulan sampah dilakukan untuk mempermudah pengangkutan sampah menuju TPA. Pemerintah menyediakan TPS sebagai tempat pengumpulan sampah sebelum akhirnya diangkut menuju TPA. Proses pengangkutan dilakukan mulai dari sumber sampah dari sumber menuju TPS dan juga pengangkutan dari TPS menuju TPA. Pengangkutan dari sumber sampah menuju TPS merupakan tanggung jawab dari pihak yang bersangkutan. Pemrosesan akhir dilakukan di TPA, Kota Semarang sendiri memiliki satu TPA yaitu Jatibarang. Land Field Gas atau LFG

merupakan salah satu program pemrosesan sampah di TPA Jatibarang. Program selanjutnya adalah Maggot yang merupakan larva dari lalat Black Soldier Fly (BSF), larva ini yang dimanfaatkan sebagai pengurai sampah. Selanjutnya adalah PT. Nerpati yang melakukan kerjasama dengan pemerintah Kota Semarang sejak tahun 2007 dengan perjanjian kontrak selama 25 tahun. Kerjasama ini digadag-gadang dapat menjawab sedikit permasalahan mengenai sampah. Namun kerjasama ini sudah berhenti

4. Sarana dan Prasarana

Dikatakan bahwa sarana prasarana dirasa masih kurang memadai. Timbulan sampah yang dihasilkan begitu besar bahkan pada setiap harinya saja, yang tentunya harus diimbangi dengan kebutuhan sarana prasarana yang mencukupi pula. Dimulai dari TPS, untuk saat ini jumlah TPS sudah dirasakan mencukupi kekurangan untuk jumlah sendiri dirasa masih bisa ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup.

5. Sumberdaya manusia

UPTD TPA selaku pelaksana teknis memiliki struktur yang dipimpin oleh kepala UPTD dengan jabatan dibawahnya adalah sub bagian tata usaha serta kelompok jabatan fungsional lainnya, UPTD juga membawahi para supir armada pengangkutan. Tidak ada permasalahan dalam sumberdaya manusia pada unit pelaksanaan ini dikarenakan

menerapkan sistem dan budaya kerja yang baik.

6. Pengawasan dan Evaluasi

Pengawasan dilakukan langsung oleh Dinas Lingkungan Hidup kepada UPTD TPA. Kepala UPTD bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup, dan kepala UPTD bertanggung jawab mengawasi pegawai UPTD. Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk mengadakan analisis dalam melihat capaian kerja yang telah disusun serta menentukan tindakan selanjutnya dalam pelaksanaannya. Dinas Lingkungan Hidup juga melakukan evaluasi secara berjangka yaitu setiap 6 bulan sekali. Kepala DLH juga diawasi langsung oleh Pemerintah Kota Semarang yaitu Walikota. Sedangkan untuk UPTD TPA evaluasi dilakukan oleh kepala Dinas Lingkungan Hidup.

E. Kesimpulan

Pemerintah melaksanakan berbagai upaya dalam menangani permasalahan sampah. Dalam pelaksanaannya tentunya dibutuhkan kerjasama yang harmonis antara berbagai pihak yang terlibat didalamnya. Pemerintah Semarang melakukan berbagai upaya dalam pengelolaan sampah ini, seperti tindakan pencegahan dengan pembatasan penggunaan sampah plastik dan juga pemrosesan sampah pada TPA. Terdapat berbagai program dalam pemrosesan sampah di TPA yang sudah cukup efektif dalam keberlangsungannya. Proses pengolahan sampah yang dilakukan adalah

budidaya maggot, pemanfaatan gas metan menjadi listrik serta kerjasama yang dilakukan dengan PT. Narpati.

F. Saran

Perlu adanya Peningkatan kinerja dari Dinas lingkungan Hidup dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengurangan dan juga pengolahan sampah sebelum akhirnya sampai ke TPA Jatibarang. Peningkatan sarana dan prasarana juga menjadi perhatian bagi pemerintah daerah. Perawatan armada menjadi salah satu solusi untuk meminimalisir anggaran pengadaan untuk armada itu sendiri.

Daftar Pustaka

- Handoko, Hani. 2015. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA.
- Keban, Y.T. 2008. *Enam Dimensi Strategi Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta : Gava Media.
- Mujahida, Sitti. 2018. *Pengantar Manajemen*. Bandung : EKSIS MEDIA GRAFISINDO
- Pontoh, Nia K dan Iwan Kustiawan. 2018. *Pengantar Perencanaan Perkotaan*. Bandung : ITB Press.
- Syafiie, Inu Kencana. 2010. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Yunus, Hadi sabari. 2009. *Klasifikasi Kota*. Yogyakarta : PUSTAKA PELAJAR.

UU No. 18 Tahun 2008 Tentang
Pengolahan Sampah.

Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2012
Tentang Pengelolaan
Persampahan di Kota Semarang.